



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA



KABUPATEN SEMARANG



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



KAJIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN 2023

**KAJIAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
KESEJAHTERAAN KABUPATEN
SEMARANG
2023**

KATA PENGANTAR

Dalam membantu memperbaiki dan mempercepat kemajuan suatu daerah diperlukan pembangunan manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengelola segala bentuk sumber daya yang ada dalam upaya mencapai kemandirian dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Data dan informasi pembangunan manusia yang ada dalam publikasi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Semarang sebagai hasil dari program dan kinerja pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Selain menyajikan data capaian pembangunan manusia di Kabupaten Semarang, dalam publikasi ini juga terdapat beberapa capaian daerah lain di Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional yang digunakan sebagai pembanding. Publikasi ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih baik di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk publikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga semua usaha bersama ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk pembangunan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.



Ungaran, Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Semarang

PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720423 199203 1 005

RINGKASAN

Masa pemulihan pasca pandemi COVID 19, memberikan dampak terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk pada perkembangan pembangunan manusia. Penerapan kebijakan pemulihan pasca pandemi ini memberikan pengaruh yang dirasakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Semarang. Di Indonesia, masa pemulihan pasca pandemi telah memberikan dampak positif terhadap IPM tahun 2022 yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Semarang, masa pemulihan pasca pandemi telah membuat IPM pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,58 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Secara peringkat, IPM Kabupaten Semarang berada di urutan ke 12, peringkat tersebut sama jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat lebih rinci lagi, indikator di bidang kesehatan dan bidang pendidikan mengalami kenaikan, akibat kebijakan pemulihan pasca pandemi yang tepat sasaran, kenaikan yang terjadi lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan positif yang terjadi efek dari pemulihan pasca pandemi dan diterapkannya kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat memberikan dampak positif yaitu terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Sehingga, pengeluaran riil per kapita sebagai perwakilan dari gambaran standar hidup layak mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan IPM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data	5
BAB II Metodologi	6
2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	6
2.2 Perubahan Metodologi IPM	7
2.3 Metode Baru Perhitungan IPM	10
2.4 Rumus Perhitungan IPM	15
2.5 Mengukur Kecepatan Pertumbuhan IPM	18
2.6 Definisi Operasional Indikator Terkait	19
BAB III Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat	
Kabupaten Semarang	23
3.1 Kependudukan	23

3.2 Kesehatan	25
3.3 Pendidikan.....	30
3.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah	30
3.3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	31
BAB IV Kemajuan Pencapaian Pembangunan	
Manusia Kabupaten Semarang.....	38
4.1 Perkembangan Kesehatan	38
4.2 Perkembangan Pendidikan.....	41
4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli	46
4.4 Kemajuan Pembangunan Manusia.....	48
4.5 Klasifikasi IPM	50
BAB V Perbandingan Pencapaian Pembangunan	
Manusia Kabupaten Semarang dengan	
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	56
5.1 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan	
IPM Nasional	56
5.2 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan	
Provinsi Jawa Tengah	57
BAB VI Analisis Kesejahteraan di Kabupaten	
Semarang.....	59
6.1 Kemiskinan	59
6.2 Ketenagakerjaan.....	62

6.3 Kepemilikan JKN.....	68
6.4 Perkembangan Pembangunan Desa	71
BAB VII Analisis SWOT dan Analisis Rekomendasi	
Kebijakan	74
7.1 Analisis SWOT	74
7.2 Rekomendasi Kebijakan	76
BAB VIII Kesimpulan dan Saran	79
8.1 Kesimpulan	79
8.2 Saran	80
Daftar Pustaka	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Peyusunan IPM.....	11
Tabel 2.2	Jenis Komoditas yang Digunakan dalam Perhitungan PPP.....	13
Tabel 2.3	Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM.....	17
Tabel 4.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2022.....	52
Tabel 6.1	Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Semarang Tahun 2022.....	72
Tabel 7.1	Analisis SWOT dalam Masalah Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan di Kabupaten Semarang.....	74
Tabel 7.2	Strategi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia.....	8
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2022.....	24
Gambar 3.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan.....	28
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Semarang, Tahun 2019-2021.....	33
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Semarang Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2021-2022.....	35
Gambar 3.5	Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2021-2022	37
Gambar 4.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang, Tahun 2013-2022.....	39
Gambar 4.2	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022.....	40

Gambar 4.3	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022.....	42
Gambar 4.4	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022.....	43
Gambar 4.5	Perkembangan Komponen Penyusun Indeks Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2013-2022.....	45
Gambar 4.6	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah per Tahun).....	48
Gambar 4.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang, Tahun 2013-2022.....	50
Gambar 4.8	Dua Belas IPM Tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.....	51

Gambar 5.1	Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan Indonesia, Tahun 2018-2022.....	57
Gambar 5.2	Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022.....	58
Gambar 6.1	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita /Bulan), Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	60
Gambar 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022.....	68
Gambar 6.3	Kepemilikan JKN (Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Semarang, Tahun 2019-2021.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang seiring dengan pembangunan yang berkaitan dengan fisik. *United Nations Development Programme* (UNDP) 1990 menyebutkan secara jelas bahwa manusia adalah pusat dan tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan.

Pembangunan manusia sejatinya mempunyai maksud untuk memperluas pilihan-pilihannya. Memperluas pilihan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Jika faktor-faktor ini tidak dapat dipenuhi secara memadai, maka pilihan-pilihan yang dapat dilakukannya menjadi terbatas.

Todaro (2006) pelaksanaan pembangunan manusia yang dilakukan harus mampu memenuhi tiga komponen universal sebagai tujuan utamanya, yaitu:

1. Kecukupan, berkaitan dengan kebutuhan dasar fisik manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan

dan keamanan. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka dapat menyebabkan terjadinya keterbelakangan absolut.

2. Jati diri, berkaitan dengan adanya dorongan dalam diri agar menjadi lebih maju, lebih baik dan layak untuk memperoleh sesuatu (*self esteem*).
3. Kebebasan dari sikap menghamba, berkaitan dengan kemerdekaan manusia. Hal ini memiliki arti sebagai kemampuan berdiri tegak dan tidak diperbudak oleh aspek materil dalam kehidupan.

Pembangunan manusia berarti memperluas pilihan. Pilihan yang lebih luas yang dapat diambil orang tercermin dalam kemampuan mereka untuk menikmati hidup, terlibat dalam aktivitas produktif, dan terlibat dalam berbagai jenis aktivitas sosial dan politik.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan sumber daya manusia, diperlukan adanya indeks untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Berbagai bentuk pengukuran pembangunan manusia telah dikembangkan, namun tidak semua negara atau wilayah dapat

menggunakannya sebagai standar yang diakui dan dapat diperbandingkan.

Konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP tahun 1990 dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat;
2. Pengetahuan, dan;
3. Standar hidup layak.

Ketiga dimensi dasar tersebut dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator. Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat dilihat melalui indikator angka harapan hidup. Lebih lanjut, dimensi pengetahuan dapat dilihat dan dinilai berdasarkan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi standar hidup layak dapat dinilai dari indikator kemampuan daya beli.

Dalam meningkatkan IPM daerah, prioritas pembangunan tidak lagi terbatas pada sektor ekonomi, tetapi mencakup semua sektor, terutama pembangunan manusia itu sendiri. Tidak terlepas dari kondisi tersebut, manusia yang berkualitas dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor lainnya. Selain itu, perencanaan kebijakan dan program pembangunan merupakan elemen kunci dalam proses percepatan pembangunan manusia, yang memastikan pelaksanaannya sesuai dengan harapan.

1.2 Tujuan

Pembangunan pengembangan sumber daya manusia telah menjadi salah satu bagian inti dari proses pembangunan selama ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia suatu daerah. Tujuan penerbitan Analisis Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang adalah untuk mempublikasikan proses dan hasil pembangunan manusia kepada masyarakat luas dan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penyusunan dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana/program ke depan sehingga dapat menjadi pedoman pengembangan

sumber daya manusia yang sedang dilaksanakan berdasarkan situasi sosial ekonomi Kabupaten Semarang.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Penyusunan buku Kajian Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Kabupaten Semarang 2023 ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Data-data yang digunakan di dalam penulisan buku ini bersumber dari instansi/lembaga pemerintahan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan bahan-bahan pendukung lainnya yang diperoleh dari berbagai buku, publikasi di *website* pemerintah, dan publikasi penelitian yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah ukuran sebenarnya dari kekayaan suatu bangsa. Pembangunan manusia diupayakan dengan tujuan menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat, terutama di bidang pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, antara lain: pengadaan sektor pangan, perbaikan gizi, perbaikan bidang kesehatan, akses fasilitas air minum yang memadai, dll. Untuk lebih memahami situasi di lapangan, diperlukan tolok ukur yang dapat menjelaskan situasi sebenarnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pencapaian pembangunan manusia berdasarkan banyak elemen mendasar dari kualitas hidup. Indikator yang digunakan untuk membangun IPM terdiri dari indikator kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan ini tidak hanya mengukur kualitas

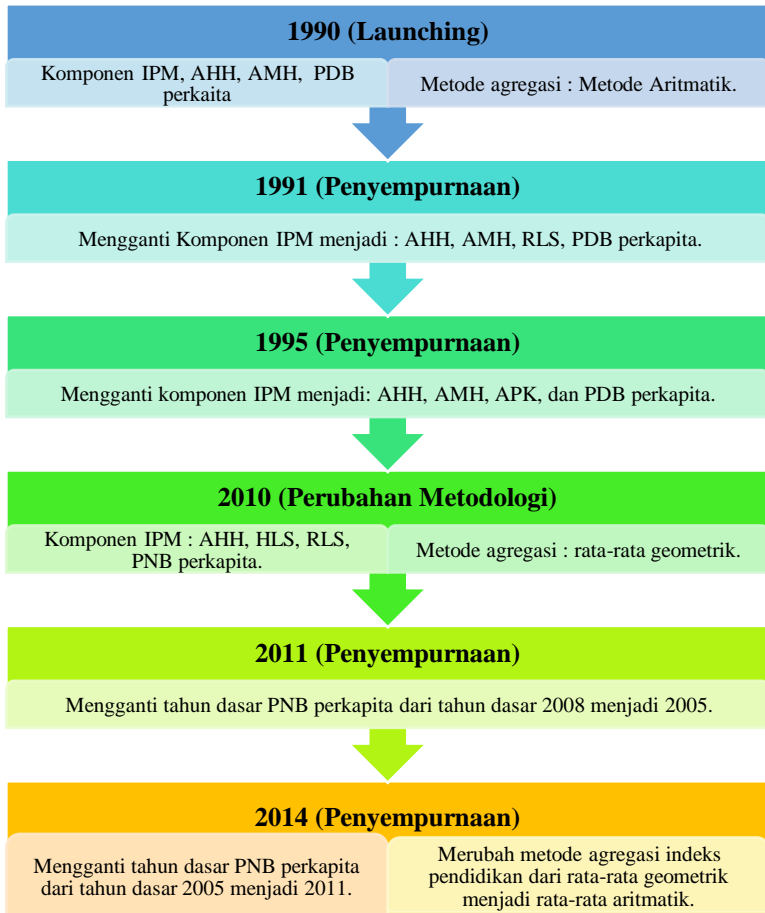
fisik semata, tetapi juga bidang non fisik. Beberapa manfaat penting dari adanya pengukuran IPM ini, yaitu:

1. Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk.
2. Sebagai penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
3. IPM menjadi data strategis bagi pemerintah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dan juga sebagai acuan pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan disertai dengan pengalokasian dana.

2.2 Perubahan Metodologi IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah konsep yang dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur pembangunan manusia. Diperkenalkan dan diterbitkan secara teratur sejak tahun 1990, konsep ini awalnya diperkenalkan dengan tiga dimensi yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang memadai. Seiring berjalannya waktu, UNDP telah melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 2.1 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perubahan metodologi perhitungan IPM dilakukan dengan dasar bahwa suatu indeks komposit harus mampu

mengukur apa yang diukur. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama dilakukannya perubahan metodologi perhitungan IPM, yaitu:

1. Beberapa indikator dianggap sudah tidak tepat lagi digunakan untuk perhitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan di sebagian negara AMH sudah tinggi, sehingga sudah tidak dapat menggambarkan perbedaan pendidikan antar negara dengan baik. Indikator lainnya yang diganti yaitu PDB per kapita. Indikator ini diganti karena di dalam perhitungannya, PDB mencakup seluruh faktor produksi yang turut menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Hal ini dianggap kurang dapat menggambarkan kondisi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
2. Penggunaan rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi pada dimensi lainnya. Padahal konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah

pemerataan antar dimensi dan menghindari terjadinya ketimpangan.

2.3 Metode Baru Perhitungan IPM

IPM metode baru yang telah disempurnakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Penggunaan indikator yang jauh lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik.
 - a. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mampu memberikan gambaran yang relevan dalam bidang pendidikan beserta dengan perubahan yang terjadi di dalamnya.
 - b. Penggunaan PNB menggantikan PDB lebih mampu memberikan gambaran mengenai pendapatan masyarakat di suatu wilayah.
2. Menggunakan rata-rata geometrik yang tidak serta merta dapat menutupi kekurangan suatu dimensi dengan dimensi lain yang lebih unggul. Dengan kata lain, dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang jauh lebih baik diperlukan keseimbangan antar dimensi yang digunakan.

**Tabel 2.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru
Penyusunan IPM**

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Panjang dan Hidup Sehat (Kesehatan)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak (Pengeluaran)	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-Rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}) \times 100$			
	Rata-rata Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}} \times 100$			

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi pembangunan manusia mencakup:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*). Dimensi ini diwakili oleh indikator

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. Pentingnya angka harapan hidup terletak pada kepercayaan bahwa umur panjang memiliki ikatan yang erat dengan harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Standar UNDP, angka harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum yaitu 85 tahun dan 20 tahun untuk nilai minimum.

2. Dimensi pengetahuan (*knowledge*). Dimensi ini diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai gambaran dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. HLS merupakan harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berumur 7 tahun. Sedangkan RLS merupakan gambaran jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
3. Dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*). Data yang digunakan sebagai perwakilan dari

dimensi ini yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Karena data ini tidak tersedia untuk tingkat daerah, maka untuk tingkat kabupaten/kota data yang digunakan yaitu indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Data ini dianggap mampu menggambarkan pendapatan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai *output* dari semakin membaiknya perekonomian. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru dilakukan berdasarkan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Gambaran paket 96 komoditas yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jenis Komoditas yang digunakan Dalam Perhitungan PPP

Makanan				Non Makanan	
1.	Beras	34.	Pepaya	1.	Rumah sendiri/bebas sewa
2.	Tepung terigu	35.	Minyak kelapa	2.	Rumah kontrak
3.	Ketela pohon/Singkong	36.	Minyak goreng lainnya	3.	Rumah sewa
4.	Kentang	37.	Kelapa	4.	Rumah dinas

Makanan			Non Makanan
5.	Tongkol/Tuna/Cakalang	38. Gula pasir	5. Listrik
6.	Kembung	39. Teh	6. Air PDAM
7.	Bandeng	40. Kopi	7. LPG
8.	Mujair	41. Garam	8. Minyak tanah
9.	Mas	42. Kecap	9. Lainnya (batu baterai/aki/korek/obat nyamuk,dll)
10.	Lele	43. Penyedap masakan/vetsin	10. Perlengkapan mandi
11.	Ikan segar lainnya	44. Mia instan	11. Barang kecantikan
12.	Daging sapi	45. Roti manis/roti lainnya	12. Perawatan kulit/muka/kuku/rambut
13.	Daging ayam ras	46. Kue kering	13. Sabun cuci
14.	Daging ayam kampung	47. Kue basah	14. Biaya RS Pemerintah
15.	Telur ayam ras	48. Makanan gorengan	15. Biaya RS Swasta
16.	Susu kental manis	49. Gado-gado/ketoprak	16. Puskesmas/pustu
17.	Susu bubuk	50. Nasi campur/rames	17. Praktek dokter/poliklinik
18.	Susu bubuk bayi	51. Nasi goreng	18. SPP
19.	Bayam	52. Nasi putih	19. Bensin
20.	Kangkung	53. Lontong/ketupat sayur	20. Transportasi/pengangkutan umum
21.	Kacang panjang	54. Soto/gule/sop/ra won/cincang	21. Pos dan telekomunikasi
22.	Bawang merah	55. Sate/tongseng	22. Pakaian jadi laki-laki dewasa

Makanan				Non Makanan	
23.	Bawah putih	56.	Mie bakso/Mie rebus/Mie goreng	23.	Pakaian jadi perempuan dewasa
24.	Cabe merah	57.	Makanan ringan anak	24.	Pakaian jadi anak-anak
25.	Cabe rawit	58.	Ikan (bakar/goreng dll)	25.	Alas kaki
26.	Tahu	59.	Ayam/daging (goreng dll)	26.	Minyak pelumas
27.	Tempe	60.	Makanan jadi lainnya	27.	Meubelair
28.	Jeruk	61.	Air kemasan galon	28.	Peralatan rumah tangga
29.	Mangga	62.	Minuman jadi lainnya	29.	Perlengkapan perabot rumah tangga
30.	Salak	63.	Es lainnya	30.	Alat-alat dapur/makan
31.	Pisang Ambon	64.	Rokok kretek filter		
32.	Pisang raja	65.	Rokok kretek tanpa filter		
33.	Pisang lainnya	66.	Rokok putih		

2.4 Rumus Perhitungan IPM

Untuk memperoleh nilai IPM, terdapat dua tahap perhitungan yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama*, menghitung indeks masing-masing komponen penyusun IPM. Komponen tersebut terdiri atas dimensi umur panjang dan

hidup layak/kesehatan, dimensi pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak/pengeluaran.

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pengetahuan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} - I_{RLS_{min}}}{2}$$

3. Dimensi Standar Hidup Layak

$$PPP = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$$

Dalam menghitung indeks masing-masing komponen penyusun IPM di atas terdapat batas maksimum dan minimum yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

* daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

** daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir 2025) (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Kedua, hasil perhitungan dari ketiga komponen tersebut baru dapat digunakan untuk menghitung IPM secara umum. Rumus yang digunakan untuk menghitung IPM sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} I_{pendidikan} I_{pengeluaran}}$$

dimana:

$I_{kesehatan}$: Indeks harapan hidup

$I_{pendidikan}$: Indeks RLS dan Indeks HLS

$I_{pengeluaran}$: Indeks pengeluaran per kapita

Untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu daerah dalam waktu tertentu, maka IPM dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan status capaiannya. Adapun pengelompokannya sebagainya berikut:

1. Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
2. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Rendah : $IPM < 60$

2.5 Mengukur Kecepatan Pertumbuhan IPM

Indeks pembangunan manusia dihitung secara rutin setiap tahunnya. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara pencapaian saat ini dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Jika nilai IPM semakin tinggi, maka dapat dikatakan terjadinya percepatan pertumbuhan IPM. Rumus

yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan IPM pada periode waktu tertentu yaitu:

$$\text{Petumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

2.6 Definisi Operasional Indikator Terkait

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui permasalahan dan pembangunan manusia di antaranya:

- **Rasio Jenis Kelamin:** Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
- **Rata-rata Lama Sekolah:** Rata-rata lamanya (tahun) penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

- **Harapan Lama Sekolah:** Lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Angka Partisipasi Sekolah:** Proporsi dari penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
- **Angka Partisipasi Murni:** Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
- **Angka Partisipasi Kasar:** Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Sejak 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

- **Jumlah Penduduk Usia Sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 tahun sampai 24 tahun
- **Angkatan Kerja:** Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- **Bekerja:** Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk berusia 10 tahun.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu
- **Angka Harapan Hidup saat lahir:** Jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian

menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

- **Pengeluaran:** pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

BAB III

GAMBARAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

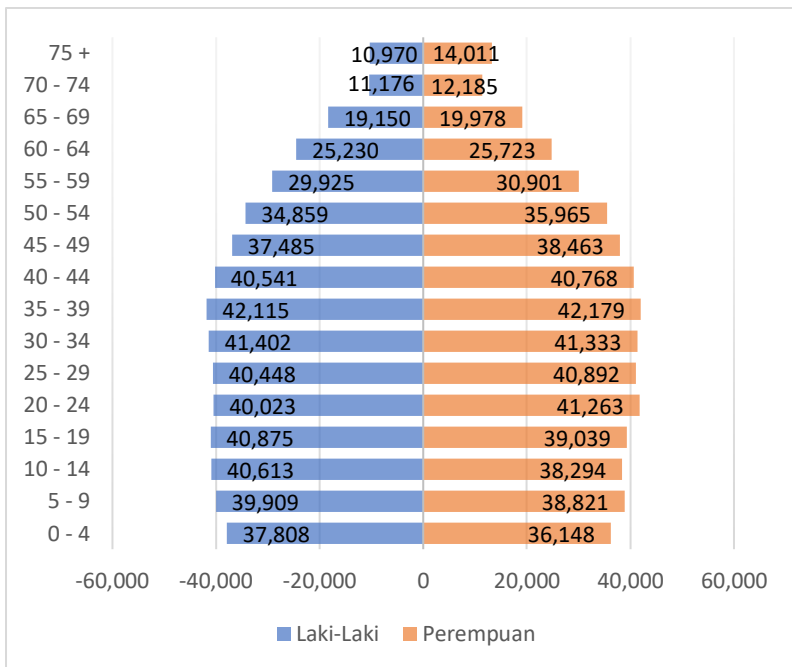
3.1 Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang sedang berlangsung. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan apabila pertumbuhan penduduk tersebut diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2022 berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 sebanyak 1.068.492 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 532.529 jiwa penduduk laki-laki dan 535.963 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibanding tahun 2021 yakni 0,82%. Distribusi penduduk Kabupaten Semarang menurut kelompok umur pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok usia produktif dengan rentang usia 15-64 tahun sebanyak 749.429 jiwa (70,14 persen).

Kemudian diikuti kelompok 0-14 tahun sebanyak 231.593 jiwa (21,67 persen), dan yang paling sedikit pada kelompok usia 65-75 ke atas sebanyak 87.470 jiwa (8,19 persen).

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Semarang, Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Piramida penduduk merupakan suatu gambaran yang memperlihatkan persebaran penduduk dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat umur. Gambar 3.1 di atas memberikan hasil bahwa komposisi penduduk di

Kabupaten Semarang tahun 2022 termasuk dalam jenis piramida penduduk ekspansif. Hal ini dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda yang tinggi yang menandakan penduduk di Kabupaten Semarang tahun 2022 mengalami pertumbuhan.

Jumlah penduduk yang mengalami pertumbuhan dengan cepat di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ketersediaan lapangan kerja yang cukup besar (sektor manufaktur). Jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi salah satu sumber kekuatan utama dalam percepatan pembangunan atau yang lebih sering dikenal dengan keunggulan bonus demografi. Namun, jika jumlah penduduk yang tinggi ini tidak diiringi dengan kemampuan dan kualitas yang baik maka jumlah penduduk yang banyak ini dapat mengganggu atau bahkan memperlambat proses pembangunan.

3.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Karena kesehatan merupakan modal pertama kehidupan individu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan dianggap sebagai bentuk investasi yang

memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia di bidang kesehatan ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan umur yang lebih panjang.

Teori klasik H. L. Bloom menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu:

1. Gaya hidup

Gaya hidup yang dipertahankan seseorang dalam aktivitas sehari-hari memberikan kontribusi yang signifikan terhadap status kesehatannya. Gaya hidup sehat memungkinkan individu terhindar dari berbagai penyakit. Sebaliknya, gaya hidup yang tidak sehat menyebabkan berbagai penyakit. Faktor gaya hidup ini menyumbang 30% dari kesehatan penduduk.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, faktor lingkungan seperti menjaga kebersihan yang baik merupakan faktor yang paling berperan dalam upaya peningkatan kesehatan penduduk.

3. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan mengacu pada ketersediaan fasilitas kesehatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk pelayanan prima yang melayani semua bidang. Fasilitas kesehatan ini memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

4. Genetik

Faktor genetik (keturunan) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan genetik. Untuk meminimalkan kondisi genetik ini, pasien diharapkan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan secara teratur. Faktor genetik ini berkontribusi 5% terhadap kesehatan masyarakat.

Gambar 3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan



Sumber: Departemen Kesehatan RI

Menurut teori H.L. Bloom, faktor lingkungan memiliki pengaruh terbesar terhadap status kesehatan. Indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi lingkungan adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses air minum yang layak. Selain itu, faktor perilaku kesehatan dan pelayanan kesehatan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 30% dan 20% terhadap status kesehatan. Indikator yang dapat digunakan terkait faktor ini adalah dokter kandungan dan angka pernikahan dini. Pernikahan dini

dianggap sebagai risiko yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Berbicara mengenai fasilitas kesehatan, hingga tahun 2022 fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Semarang terdiri atas 5 unit rumah sakit umum, 26 unit puskesmas dan 68 unit puskesmas pembantu. Dari keseluruhan fasilitas kesehatan yang ada, diisi oleh berbagai macam tenaga medis, yaitu 133 dokter spesialis, 146 dokter, 31 dokter gigi, 6 dokter gigi spesialis, 956 perawat, dan 477 bidan.

Untuk melihat capaian pembangunan di bidang kesehatan yang sudah dilakukan, dapat digunakan beberapa indikator sebagai tolok ukur. Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH). Nilai AHH yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk menjalani hidup lebih panjang. Tahun 2022 AHH Kabupaten Semarang sebesar 75,86. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,79. Nilai yang meningkat ini menunjukkan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang.

3.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Menurut Todaro (2000) pendidikan merupakan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan dan sifatnya mendasar. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan kunci untuk membentuk masyarakat yang berkualitas, mampu menyerap teknologi modern yang bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan di antaranya: rata-rata lama sekolah dan tingkat partisipasi sekolah.

3.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) memiliki arti sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui kualitas/tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah. Nilai rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat di setiap tahunnya, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas sumber

daya manusia di daerah tersebut. Cakupan perhitungan rata-rata lama sekolah yaitu penduduk yang berusia di atas 25 tahun dengan asumsi bahwa di usia 25 sudah menyelesaikan pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Semarang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Semarang sebesar 7,87 tahun. Hingga tahun 2022 rata-rata lama sekolah sudah menyentuh angka 8,05 tahun meningkat tipis dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,03 tahun.

3.3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

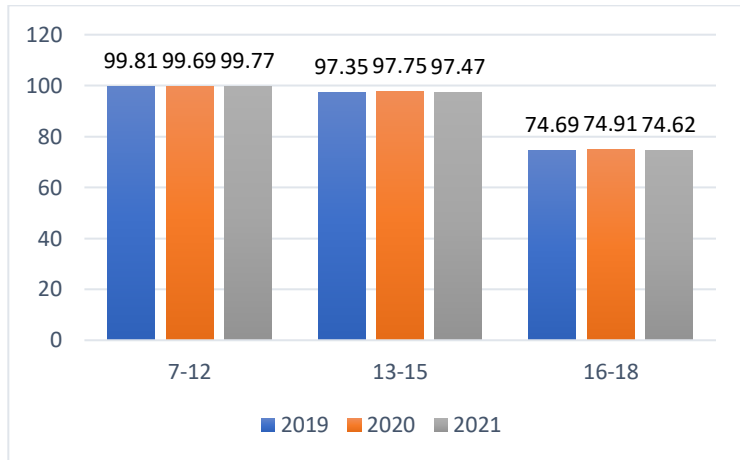
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan “Setiap orang yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Dalam undang-undang yang sama, pasal 11 ayat 2 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Bunyi pasal ini juga dimuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan pada pasal 90 poin c.

Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin pelayanan pendidikan bagi masyarakat menandakan bahwa seharusnya tidak ada lagi penduduk yang berusia tujuh tahun hingga lima belas tahun yang tidak mendapatkan pendidikan. Untuk melihat dan mengukur perkembangan pelayanan pendidikan yang ada, dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

3.3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian). Semenjak tahun 2007, pendidikan non formal (paket A, paket B, dan paket C) juga diperhitungkan. Perhitungan APS secara umum dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur, yaitu: 1) kelompok umur 7-12 tahun; 2) kelompok umur 13-15 tahun; dan 3) kelompok umur 16-18 tahun. Nilai APS berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan bahwa semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Semarang, Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada gambar 3.3 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Semarang tahun 2019 sampai 2021 relatif stabil. Tahun 2021, penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah sebesar 99,77 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99,69 persen. Kondisi yang berbeda terjadi pada penduduk umur 13-15 tahun. Tahun 2021 penduduk yang bersekolah sebesar 97,47 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,75 persen. Untuk penduduk umur 16-18 tahun yang bersekolah sebesar 74,62

persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,91 persen.

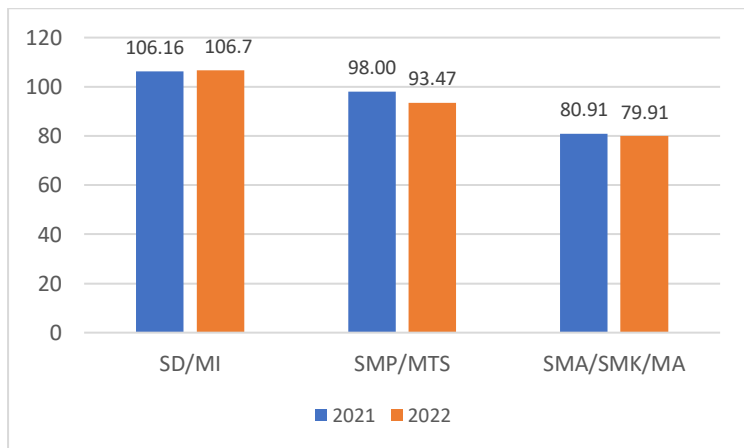
Angka partisipasi sekolah yang semakin rendah menunjukkan bahwa semakin rendah penduduk yang tidak bersekolah. Begitu juga dengan semakin tinggi angka partisipasi sekolah pada tingkat usia yang lebih tinggi, memungkinkan semakin tinggi tingkat pendidikan yang sedang ditempuh oleh penduduk di Kabupaten Semarang. Jika dibandingkan dari tiga kelompok umur dalam tabel di atas, diketahui bahwa semakin tinggi kelompok usia penduduk maka angka partisipasi sekolahnya lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Hal ini terjadi karena semakin tinggi usia penduduk, tingkat pendidikan yang ditempuh juga semakin tinggi dan semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut seperti biaya pendidikan yang harus dikeluarkan, keputusan individu penduduk itu sendiri, dan faktor ekonomi keluarga.

3.3.2.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu (tanpa memandang usia

penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan yang sama. Besarnya nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Hal ini dikarenakan populasi penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu mencakup penduduk di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Semarang Menurut Tingkat Pendidikan, 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

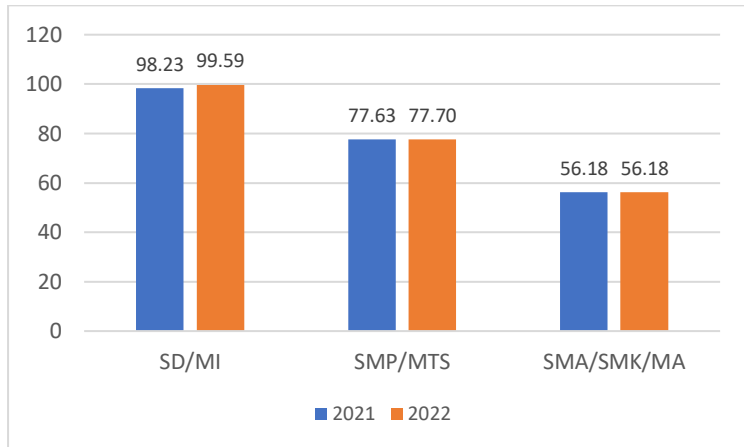
Gambar 3.4 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar di Kabupaten Semarang untuk tingkat SD/MI pada tahun 2022 sebesar 106,70 persen. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 106,16

persen. Untuk tingkat SMP/MTS angka partisipasi kasar sebesar 93,47 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 98,00 persen. Sedangkan pada tingkat SMA/MI angka partisipasi kasar sebesar 79,91 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 80,91 persen.

3.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di tingkat pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM terbagi atas tiga kelompok, yaitu: 1) tingkat Sekolah Dasar (SD) usia 7-12 tahun, 2) tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) usia 13-15 tahun, dan 3) tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) usia 16-18 tahun.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada gambar 3.5 menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,59 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,23 persen. Untuk tingkat SMP/MI angka partisipasi murni sebesar 77,70 persen meningkat sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 77,63 persen. Nilai yang sama angka partisipasi murni terjadi pada tingkat SMA/MA, Tahun 2022 nilai angka partisipasi murni tingkat SMA/MI sebesar 56,18 persen naik sama dengan tahun 2021.

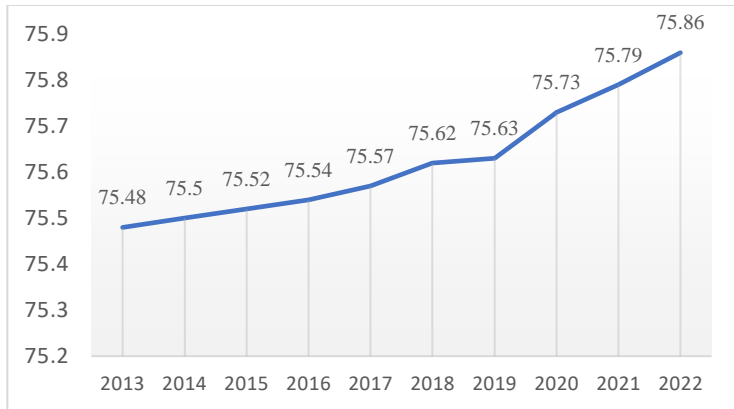
BAB IV

KEMAJUAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SEMARANG

4.1 Perkembangan Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) ialah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan penduduk di suatu negara atau daerah. Semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk tersebut maka diharapkan semakin tinggi juga kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika tingkat kesehatannya rendah maka kesempatan bertahan hidupnya cenderung rendah atau usia hidupnya pendek. Indikator angka harapan hidup ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan.

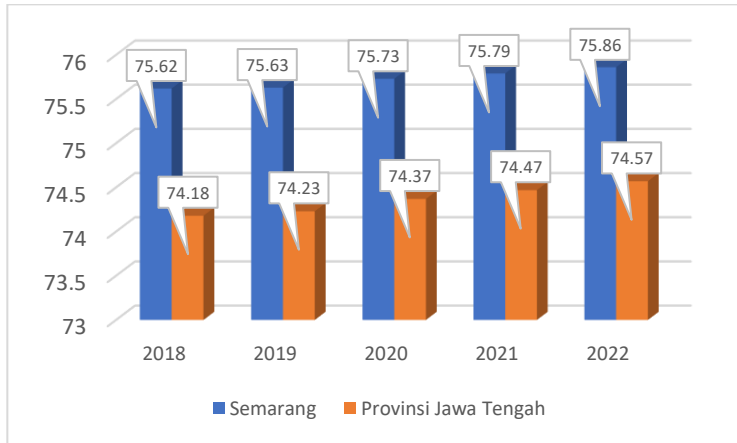
Gambar 4.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang, Tahun 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2013 hingga 2022, angka harapan hidup di Kabupaten Semarang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Semarang semakin membaik setiap tahunnya. Nilai AHH tahun 2022 sebesar 75,86 memiliki arti rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun tersebut memiliki peluang untuk dapat bertahan hidup hingga usia 75,86 tahun. Nilai AHH yang terus meningkat ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk terutama di bidang kesehatan memberikan dampak yang positif dari tahun ke tahun.

Gambar 4.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah sama-sama menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, jika dilihat pada gambar 4.2 diketahui bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari pertumbuhannya, angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 0,13 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Semarang yang hanya tumbuh sebesar 0,09 persen. Namun, hasil ini sudah cukup

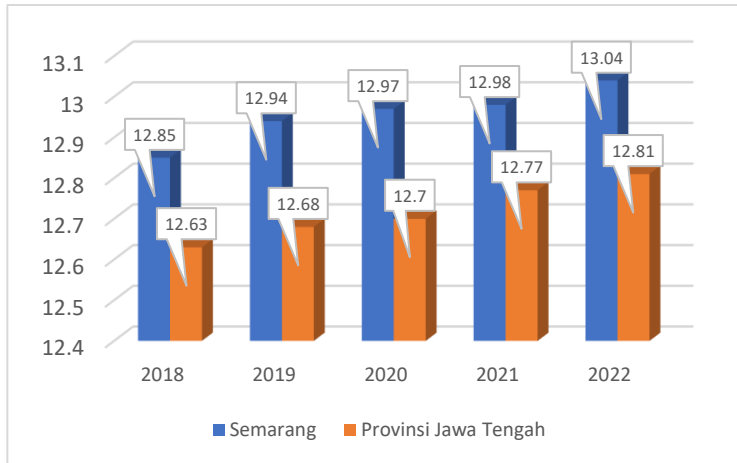
memberikan gambaran mengenai kinerja dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

4.2 Perkembangan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah daerah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, produktivitas, sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas pula. Untuk mengukur perkembangan pendidikan sebagai gambaran kualitas sumber daya manusia sekaligus tingkat pembangunan di suatu daerah, maka dapat digunakan dua indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) ialah lamanya sekolah (dalam tahun) di sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berumur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Gambar 4.3 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



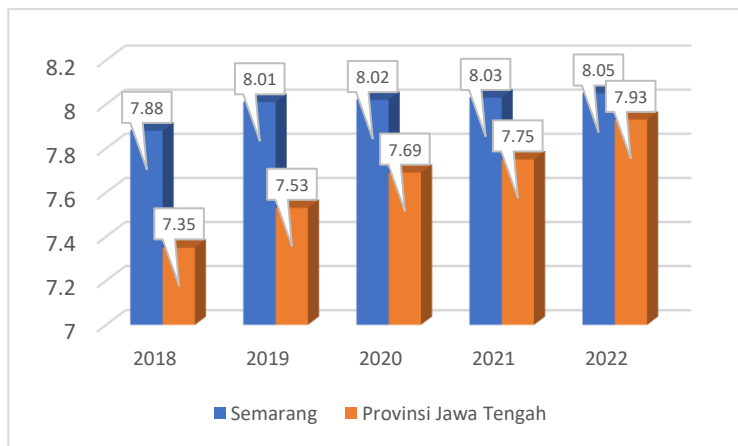
Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2022 sama-sama menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, harapan lama sekolah Kabupaten Semarang sedikit lebih tinggi. Pada gambar 4.3 terlihat bahwa tahun 2022 angka harapan lama sekolah Kabupaten Semarang sebesar 13,04 selisih 0,23 poin dengan Provinsi Jawa Tengah.

Indikator kedua bidang pendidikan yang merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pendidikan formal tersebut dihitung lama sekolahnya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu 6 tahun untuk tamatan SD, 9 tahun untuk tamatan SMP dan 12 tahun untuk tamatan SMA tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Gambar 4.4 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



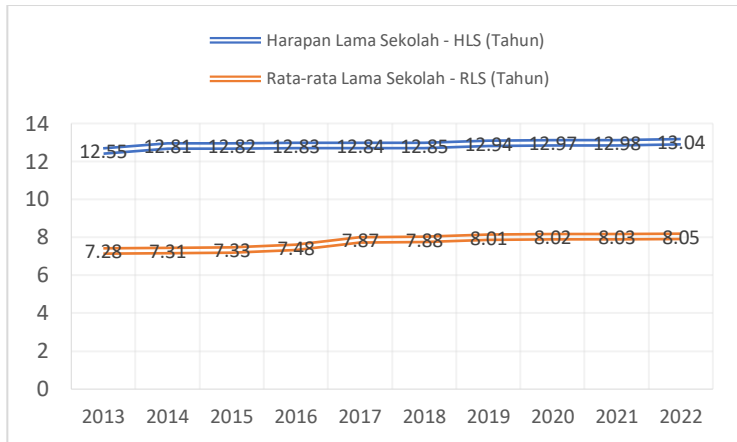
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Secara rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang. Rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut tumbuh sebesar 2,32 persen berbanding 0,24 persen untuk pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Semarang. Nilai rata-rata lama sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan di bidang pendidikan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Semarang.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan, namun keduanya memilih perbedaan yang sangat jauh. Jika harapan lama sekolah menggambarkan harapan yang ingin diraih yang dihitung sejak pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar, rata-rata lama sekolah menggambarkan pencapaian yang sudah diraih hingga saat ini.

Gambar 4.5 Perkembangan Komponen Penyusun Indeks Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2022^[s1]



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Semarang selalu menunjukkan tren peningkatan. Nilai harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 13,04. Nilai ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Semarang yang baru menempuh pendidikan sekolah dasar memiliki kemungkinan untuk dapat terus bersekolah hingga 13 tahun masa pendidikan (setara Diploma I). Sedangkan nilai rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar 8,05. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Semarang yang berusia

25 tahun ke atas memiliki pendidikan hanya sampai kelas 2 SLTP/ sederajat.

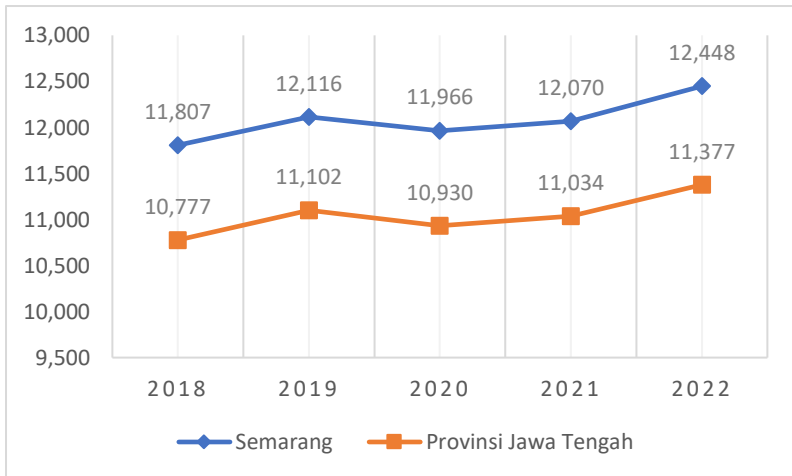
4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli

Indikator terakhir yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak. Standar hidup layak ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan penduduk seiring dengan terjadinya perbaikan kondisi perekonomian. Untuk menghitung standar hidup layak, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang sebesar Rp. 11.807 per tahun. Hingga tahun 2019 nilai ini tumbuh sebesar 2,61 persen atau menjadi Rp. 12.116 per tahun. Tahun 2020 pengeluaran per kapita ini mengalami penurunan sebesar 1,23 persen atau menjadi Rp. 11.966 per tahun. Penurunan ini terjadi karena terjadinya tekanan berat pada indikator ekonomi makro dan sosial akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga membuat kondisi

perekonomian masyarakat terganggu. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang kembali mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 4,02 persen atau menjadi Rp. 12.448 per tahun. Kondisi yang sama juga terjadi pada perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Jawa Tengah. Jika dilakukan perbandingan antara kondisi pengeluaran per kapita disesuaikan antara Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Semarang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah. Pada gambar 4.6 terlihat bahwa tahun 2022 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Semarang sebesar Rp. 12.448 per tahun, selisih Rp. 1.068 dengan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun keduanya menunjukkan tren pergerakan yang sama selama lima tahun terakhir.

Gambar 4.6 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah per Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

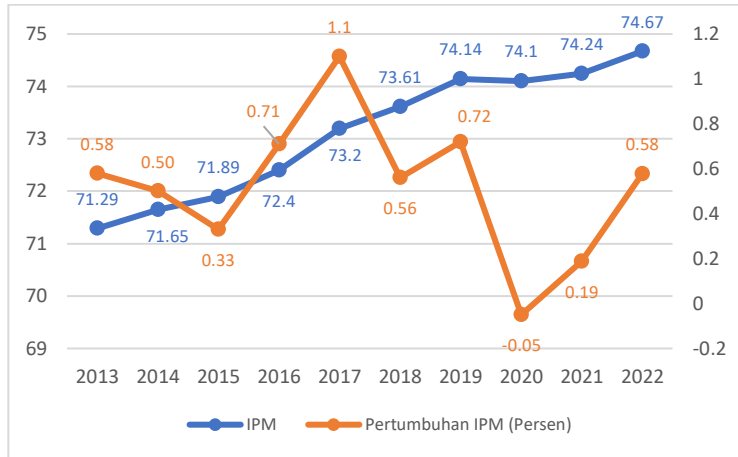
4.4 Kemajuan Pembangunan Manusia

Proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua wilayah di dunia memberikan dampak terhadap berbagai bidang dalam kehidupan. Kegiatan pendidikan, perkantoran, dan sejenisnya yang sebelumnya dilaksanakan secara virtual, mulai Kembali dilaksanakan secara tatap muka. Begitu juga dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya dilakukan pembatasan untuk menghindari terjadi kerumunan sebagai bentuk

antisipasi penyebaran virus saat ini sudah ada pelonggaran peraturan.

Terjadinya pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat secara besar-besaran juga memberikan dampak terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Semarang. Tahun 2022, IPM Kabupaten Semarang sebesar 74,67 mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,24. Selama sepuluh tahun terakhir, trend IPM Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Hanya di tahun 2020 saja yang mengalami penurunan hingga -0,05. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus dilakukan, IPM Kabupaten Semarang kembali mengalami pertumbuhan positif. Dalam periode yang sama, IPM Kabupaten Semarang pernah tumbuh sampai 1,10 persen di tahun 2017. Kondisi ini membuat posisi IPM Kabupaten Semarang tetap berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Gambar 4.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang, 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

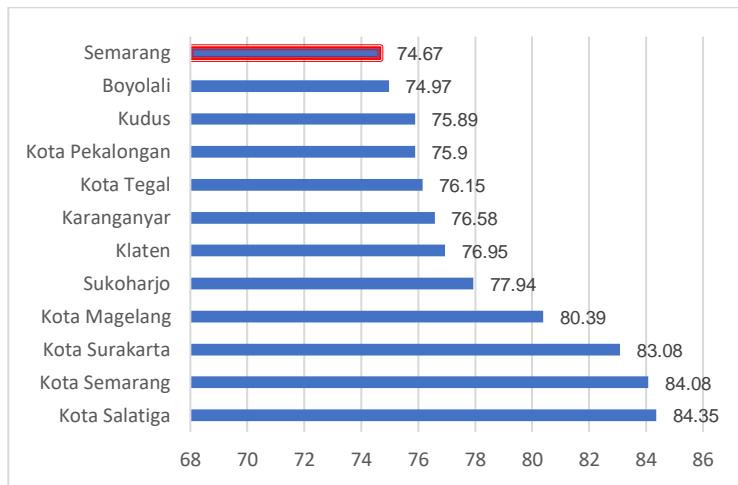
Indeks pembangunan manusia Kabupaten Semarang yang mengalami peningkatan selama pemulihan pasca pandemi COVID 19 ini merupakan dampak positif terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai gambaran dari tingkat kesejahteraan yang dirasakan penduduk Kabupaten Semarang sebagai dampak dari perkembangan kondisi perekonomian.

4.5 Klasifikasi IPM

Pengklasifikasian indeks pembangunan manusia bertujuan untuk melihat perkembangan dari capaian

pembangunan manusia antar daerah. Berikut ini merupakan beberapa daerah dengan capaian indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022.

Gambar 4.8 Dua Belas IPM Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar 74,67. Nilai ini menempatkan Kabupaten Semarang sebagai daerah dengan IPM tertinggi ke dua belas di Provinsi Jawa Tengah. Untuk IPM tertinggi terdapat di daerah Kota Salatiga (84,35) dan Kota Semarang (84,08). Posisi IPM Kabupaten Semarang di tahun ini tetap di peringkat dua belas seperti tahun sebelumnya. Konsistensi

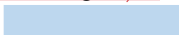

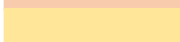
peringkat ini terjadi sebagai dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19 yang sempat membuat aktivitas ekonomi menjadi lemah yang berdampak terhadap penurunan pengeluaran riil per kapita.

Tabel 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2022

Kab/Kota	IPM		Peningkatan (Point)
	2021	2022	
Provinsi Jawa Tengah	72,16	72.79	0.63
Kabupaten Cilacap	70,42	70.99	0.57
Kabupaten Banyumas	72,44	73.17	0.73
Kabupaten Purbalingga	69,15	69.54	0.39
Kabupaten Banjarnegara	67,86	68.61	0.75
Kabupaten Kebumen	70,05	70.79	0.74
Kabupaten Purworejo	72,98	73.6	0.62
Kabupaten Wonosobo	68,43	68.89	0.46
Kabupaten Magelang	70,12	70.85	0.73
Kabupaten Boyolali	74,40	74.97	0.57
Kabupaten Klaten	76,12	76.95	0.83
Kabupaten Sukoharjo	77,13	77.94	0.81
Kabupaten Wonogiri	70,49	71.04	0.55
Kabupaten Karanganyar	75,99	76.58	0.59
Kabupaten Sragen	74,08	74.65	0.57
Kabupaten Grobogan	70,41	70.97	0.56
Kabupaten Blora	69,37	69.95	0.58
Kabupaten Rembang	70,43	71	0.57
Kabupaten Pati	72,28	73.14	0.86

Kab/Kota	IPM		Peningkatan (Point)
	2021	2022	
Kabupaten Kudus	75,16	75.89	0.73
Kabupaten Jepara	72,36	73.15	0.79
Kabupaten Demak	72,57	73.36	0.79
Kabupaten Semarang	74,24	74.67	0.43
Kabupaten Temanggung	69,88	70.77	0.89
Kabupaten Kendal	72,5	73.19	0.69
Kabupaten Batang	68,92	69.45	0.53
Kabupaten Pekalongan	70,11	70.81	0.70
Kabupaten Pemalang	66,56	67.19	0.63
Kabupaten Tegal	68,79	69.53	0.74
Kabupaten Brebes	66,32	67.03	0.71
Kota Magelang	79,43	80.39	0.96
Kota Surakarta	82,62	83.08	0.46
Kota Salatiga	83,60	84.35	0.75
Kota Semarang	83,55	84.08	0.53
Kota Pekalongan	75,4	75.9	0.50
Kota Tegal	75,52	76.15	0.63

Keterangan:[s2]

-  : IPM Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$)
-  : IPM Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
-  : IPM Sedang ($60 \leq IPM < 70$)

Berdasarkan data, secara menyeluruh indeks pembangunan manusia kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 cukup Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan kategori dibandingkan tahun

sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pemulihan pasca Pandemi. Berikut beberapa Kabupaten yang mengalami perubahan kategori yaitu Kabupaten Temanggung mengalami perubahan kategori IPM yang pada tahun 2021 masuk kategori sedang berubah menjadi kategori tinggi di tahun 2022. Kabupaten Magelang mengalami perubahan kategori IPM yang pada tahun 2021 masuk kategori tinggi berubah menjadi kategori sangat tinggi di tahun 2022.

Secara umum, IPM di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat tinggi (4 daerah), tinggi (24 daerah), dan sisanya masuk kategori sedang (8 daerah). Daerah dengan IPM kategori tinggi yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Magelang. Untuk daerah yang masuk kategori tinggi di antaranya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, **Kabupaten Semarang**, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, dan

Kota Tegal. IPM Provinsi Jawa Tengah juga masuk dalam kategori ini. Sedangkan untuk sisanya masuk dalam kategori sedang.

BAB V

PERBANDINGAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SEMARANG DENGAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH

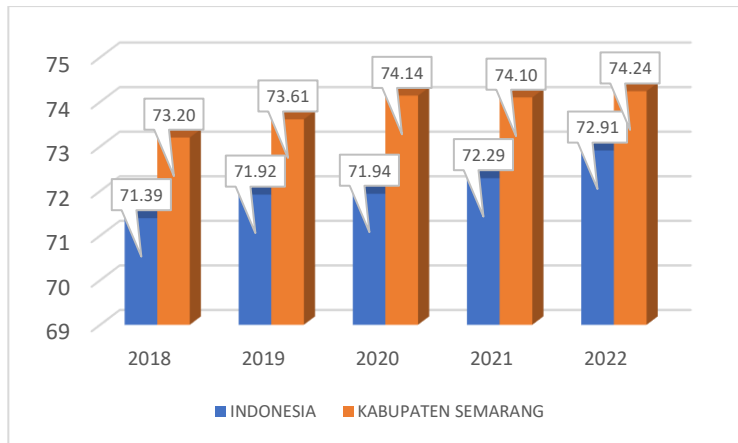
5.1 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan IPM Nasional

Selama lima tahun terakhir, indeks pembangunan manusia Kabupaten Semarang dan Nasional sama-sama menunjukkan tren peningkatan. Khusus untuk pertumbuhan IPM tahun 2021-2022 terjadi peningkatan secara nasional yang membuat angka IPM juga mengalami perubahan walaupun tidak signifikan. Pemulihan pasca COVID 19 dan pelonggaran kegiatan masyarakat membuat aktivitas sosial ekonomi menjadi meningkat sehingga berdampak terhadap peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir IPM Kabupaten Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional. Namun, secara rata-rata pertumbuhan IPM Nasional naik lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Semarang. Pertumbuhan IPM

Nasional selama tahun 2018-2022 sebesar 2,08 persen berbanding 1,42 persen untuk Kabupaten Semarang.

Gambar 5.1 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan Indonesia, Tahun 2018-2022



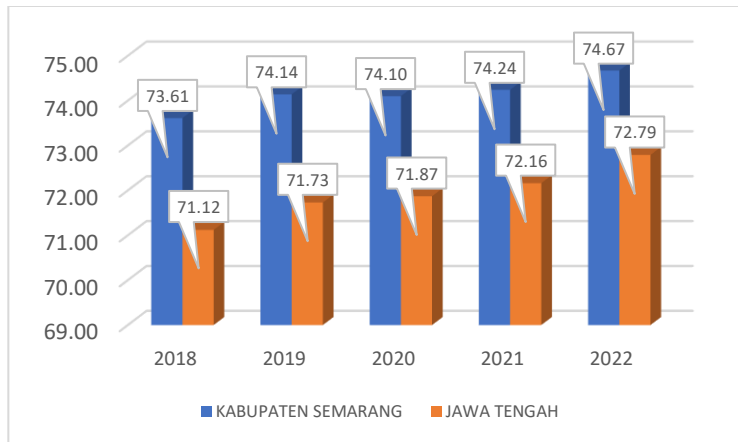
Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Semarang tahun 2022 menempati posisi tertinggi ke-12 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun peringkat tersebut sama jika dibandingkan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Semarang masih lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sama-sama mengalami

perlambatan di tahun 2022, IPM Provinsi Jawa Tengah masih terus menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,63 poin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Semarang yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,43 poin. Secara rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,58 persen lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Semarang sebesar 0,35 persen.

Gambar 5.2 Perbandingan IPM Kabupaten Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB VI

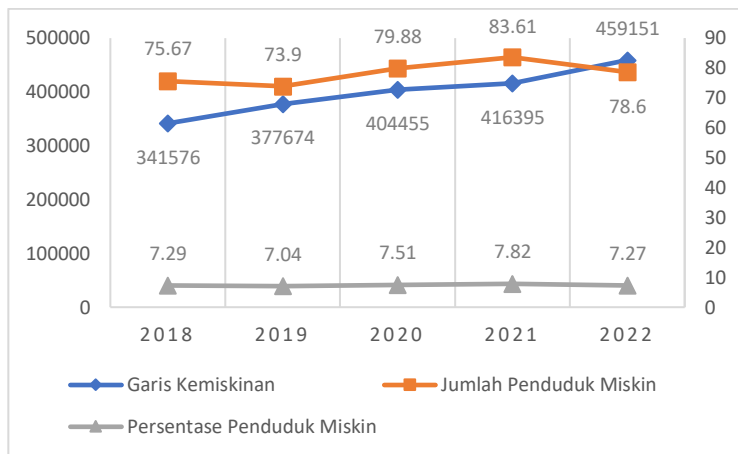
ANALISIS KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN SEMARANG

6.1 Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan sandang pendidikan

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Ukuran Kemiskinan yang disajikan hanya *Head Count Index* (HCI-P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Gambar 6.1 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan), Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, persentase penduduk kemiskinan di Kabupaten Semarang periode 2018–2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, sementara kondisi pada tahun lainnya menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin pada

tahun 2022 tercatat sebesar 7,27 persen, menurun 0,55 persen poin dari tahun 2021 dan juga menurun 0,24 persen poin terhadap tahun 2020.

Dalam gambar 6.1 juga ditampilkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 berjumlah 78,60 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah tersebut berkurang 5,01 ribu jiwa. Jumlah tersebut menjadi penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak selama tahun 2018 sampai 2022. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 1,28 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai nilai rupiah yang menjadi batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Gambar 6.1 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selama periode tahun 2021 hingga tahun 2022, Garis Kemiskinan di Kabupaten Semarang naik sebesar 42.756 poin yaitu dari Rp. 416.395, per kapita per bulan pada

pada tahun 2021 menjadi Rp.459.151, per kapita per bulan pada tahun 2022. Peningkatan nilai Garis Kemiskinan ini sejalan dengan tren perubahan harga yang menerangkan bahwa kebutuhan hidup manusia setiap tahun meningkat seiring perkembangan jaman. Garis kemiskinan Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar Rp. 459.151, per kapita per bulan, artinya adalah jika ada penduduk di Kabupaten Semarang yang mempunyai pengeluaran/konsumsi makanan dan non makanan dibawah Rp. 459.151/jiwa/bulan, maka penduduk tersebut termasuk dalam golongan miskin.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, namun penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Semarang belum signifikan.

6.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sedang, dan setelah

setelah masa kerja . Ketenagakerjaan ini sangat penting dalam suatu negara/wilayah karena berhubungan erat dengan perekonomian. Kondisi ini dikarenakan hakikat ketenagakerjaan itu sendiri sebagai tenaga yang digunakan dalam proses pembangunan sekaligus menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan pembangunan negara serta keberhasilan ketenagakerjaan itu sendiri. Beberapa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 pasal 4 ayat 1-4 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:

1. Memberdayakan tenaga kerja secara optimal.
2. Pemerataan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Pemberian perlindungan bagi tenaga kerja dalam upaya mereka mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan, tidak lepas dari pembahasan tentang kesempatan kerja, angkatan kerja, lapangan pekerjaan serta tenaga kerja. Kesempatan kerja

merupakan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, ketersediaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat persaingan dan ketersediaan lapangan kerja menjadi sedikit. Maka keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja baru menjadi sesuatu yang harus diseimbangkan keberadaannya.

Ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk di suatu negara atau daerah dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan penduduk selain faktor sumber daya yang ada di daerah itu. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk yaitu laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja. Semakin tinggi angka serapan tenaga kerja semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk.

Ketenagakerjaan, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Ramirez, dkk (1998) mengatakan bahwa: *Pertama*,

kinerja ekonomi memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga yang berkontribusi secara langsung. *Kedua*, pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi sektor perekonomian melalui kreativitas dan produktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wen, dkk (2023) bahwa dengan peningkatan pembangunan ekonomi daerah, kreativitas dan produktivitas masyarakat juga akan meningkat. Di luar dua faktor itu, faktor kesehatan dan juga pendidikan penduduk juga memberikan peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi

Hubungan saling keterkaitan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan memberikan pengaruh ke berbagai sektor lainnya dalam suatu wilayah, seperti kenaikan pendapatan per kapita penduduk, kenaikan serapan tenaga kerja, serta distribusi pendapatan yang merata.

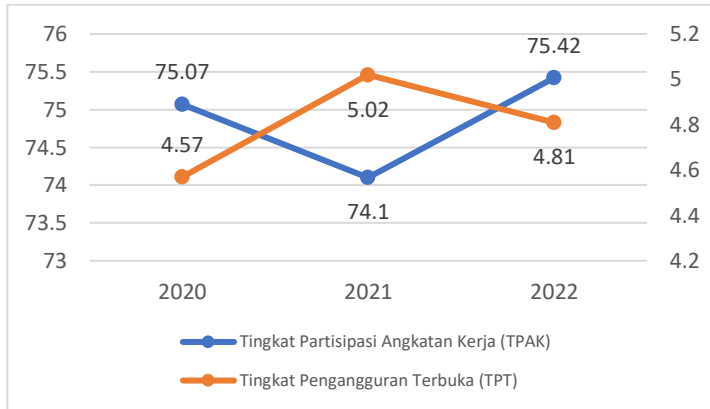
Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Semarang tahun 2021 sebesar 74,1 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,07 persen. Angka ini juga menempatkan Kabupaten Semarang

sebagai daerah dengan tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi kelima setelah Kabupaten Boyolali (75,79 persen), Kabupaten Magelang (75,78 persen) dan Kota Pekalongan (75,77 persen), Kabupaten Kudus (74,77 persen).

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat partisipasi angkatan kerja sangat erat hubungannya dengan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang paling banyak dibicarakan, yaitu pengangguran. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat pengangguran di suatu negara atau daerah yaitu tingkat pengangguran terbuka. Menurut Irandoust (2023) tingkat partisipasi angkatan kerja dengan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang negatif. Jika dalam suatu daerah tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi maka tingkat pengangguran terbuka akan rendah, begitu juga sebaliknya.

Secara statistik tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar 4,81 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen. Penurunnya angka tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Semarang pada Tahun 2022. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Tahun 2022 sebesar 75,42 lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 74,10. Hal tersebut mengindikasikan mulai membaiknya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi di Kabupaten Semarang. Akibatnya serapan tenaga kerja menjadi ikut meningkat dan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan TPT dimasa pemulihan pasca pandemi ini juga memberikan dampak positif terhadap kemiskinan.

Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

6.3 Kepemilikan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Ada 3 alasan utama menjadi peserta JKN-KIS menurut (BPJS, 2020), yaitu sebagai berikut :

6.3.1 Protection (Perlindungan)

Program JKN-KIS bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap peserta program JKN-KIS untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan masyarakat bisa meningkat produktifitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

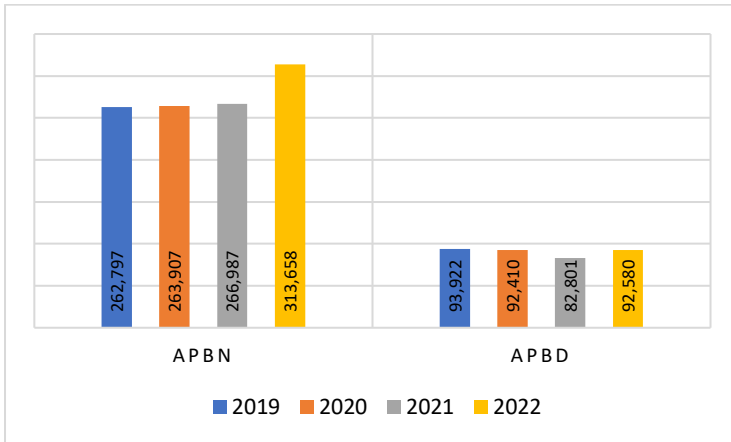
6.3.2 Sharing (Gotong royong)

Sharing mempunyai makna gotong royong yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Dengan menjadi peserta Program JKN-KIS, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit. Apabila taat membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka dalam diri tiap-tiap orang tertanam rasa kepedulian terhadap sesama terutama yang mendapat musibah berupa sakit.

6.3.3 Compliance (Patuh)

Compliance adalah adanya kepatuhan dari setiap Warga Negara Indonesia terhadap perundang-undangan untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga menjadi peserta Program JKN-KIS serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

Gambar 6.3 Kepemilikan JKN (Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Semarang, Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar 3.3 dari sumber APBN sebanyak 313,658 masyarakat telah menerima bantuan iuran ditahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 17,48% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 266.987 penerima. Dari APBN dalam 4 tahun terakhir jumlah penerima bantuan iuran terus bertambah setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penerima bantuan iuran mengindikasikan bahwa semakin luas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program jaminan nasional (JKN). Namun juga perlu diperhatikan apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak. Sementara dari sisi

APBD jumlah penerima bantuan iuran ditahun 2022 sebesar 92.580 penerima. Jumlah tersebut juga meningkat 11,81% dari tahun sebelumnya sebesar 82.801.

6.4 Perkembangan Pembangunan Desa

Perkembangan pembangunan desa dapat dilihat dari indeks desa membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan

sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**Tabel 6.1 Status Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Semarang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Status IDM		
		Berkembang	Maju	Mandiri
1	Getasan	7	1	5
2	Tengaran	10	5	0
3	Susukan	8	2	0
4	Kaliwungu	7	4	0
5	Suruh	12	4	1
6	Pabelan	11	6	0
7	Tuntang	5	10	1
8	Banyubiru	5	4	1
9	Jambu	3	4	2
10	Sumowono	14	1	1

No	Kecamatan	Status IDM		
		Berkembang	Maju	Mandiri
11	Ambarawa	2	0	0
12	Bandungan	7	2	0
13	Bawen	5	2	0
14	Bringin	12	3	1
15	Bancak	2	7	0
16	Pringapus	4	4	0
17	Bergas	6	2	1
18	Ungaran Barat	2	4	0
19	Ungaran Timur	4	1	0

Dari tabel 4.1 Kecamatan Getasan menjadi Kecamatan dengan jumlah status IDM mandiri terbanyak dengan 5 Desa diikuti dengan Kecamatan Jambu dengan 2 Desa yang berstatus mandiri. Sementara itu Kecamatan Tuntang menjadi daerah dengan status IDM maju terbanyak dengan 10 Desa diikuti oleh Kecamatan Bancak dan Pabelan yang masing-masing dengan 7 dan 6 Desa yang berstatus Maju. Selanjutnya, Kecamatan dengan status IDM berkembang paling banyak terdapat di Kecamatan Sumowono diikuti oleh Kecamatan Suruh dan Bringin yang masing-masing memiliki 12 Desa dengan status IDM berkembang.

BAB VII

ANALISIS SWOT DAN STRATEGI REKOMENASI KEBIJAKAN

7.1 Analisis SWOT

Dalam proses perumusan kebijakan, dapat digunakan Analisis SWOT yang memuat identifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Analisis SWOT dibagi dalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Tabel menampilkan faktor internal dan faktor eksternal terkait dengan masalah pembangunan manusia dan kesejahteraan di Kabupaten Semarang.

**Tabel 7.1 Analisis SWOT dalam Masalah
Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan di Kabupaten
Semarang**

No.	Faktor Internal
1.	Kekuatan
	a) Nilai IPM meningkat Setiap tahunnya menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan manusia

	<p>b) Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka</p> <p>c) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang tahun 2022 yang sebesar 7,27 persen masih lebih rendah jika dibanding persentase penduduk miskin di Jawa Tengah yang sebesar 10,93 persen.</p> <p>d) Pembangunan desa dan perbaikan kesejahteraan masyarakat desa berkembang pesat, salah satunya dengan peran BUMDes</p>
2	Kelemahan
	<p>a) Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan Kesehatan terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan</p> <p>b) Kurangnya akses secara kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dan Kesehatan terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan</p> <p>c) Kurangnya optimalisasi peran UMKM dan ekonomi kreatif.</p>
3	Peluang

	a) Memanfaatkan dengan maksimal dana dari pemerintah pusat untuk bidang pendidikan maupun Kesehatan b) Memaksimalkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis desa
4	Ancaman
	Faktor global yang dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, seperti krisis ekonomi, peningkatan pengangguran (PHK) dan wabah pandemi covid-19.

7.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah diidentifikasi di atas. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan di Kabupaten Semarang maka perlu dilakukan upaya-upaya kebijakan, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Strategi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan

No.	Strategi Kebijakan
1.	Strategi Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan Kesehatan. b) Pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. c) Peningkatan sinergitas antar lembaga/instansi, baik antar OPD, maupun dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan provinsi. d) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. e) Perkuat sistem informasi Kesehatan dan pendidikan.
2.	Strategi Peningkatan Kesejahteraan
	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kompetensi kerja bagi para pencari kerja. b) Penyempurnaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) c) Pemerataan bantuan sosial kepada masyarakat.

	<p>d) Peningkatan kualitas dan kuantitas program penanggulangan kemiskinan.</p> <p>e) Peningkatan arus investasi PMA/PMDN untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.</p> <p>f) Penguatan peran UMKM dan desa wisata sebagai penggerak pembangunan masyarakat.</p>
--	---

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pemulihan pasca pandemi telah membuat IPM pada tahun 2022 di Kabupaten Semarang tumbuh sebesar 0,58 persen menjadi 74,67 dibandingkan tahun sebelumnya
2. Secara peringkat, IPM Kabupaten Semarang berada di urutan ke 12, peringkat tersebut sama jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
3. Indikator di bidang kesehatan dan bidang pendidikan mengalami kenaikan, akibat kebijakan pemulihan pasca pandemi yang tepat sasaran, kenaikan yang terjadi lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4. Secara keseluruhan, pertumbuhan positif yang terjadi efek dari pemulihan pasca pandemi dan diterapkannya kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat memberikan dampak positif yaitu terjadinya peningkatan aktivitas

ekonomi. Sehingga, pengeluaran riil per kapita sebagai perwakilan dari gambaran standar hidup layak mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan IPM.

8.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil analisis ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu diterapkan beberapa usulan strategi yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, melakukan pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, meningkatkan sinergitas antar lembaga/instansi, baik antar OPD, maupun dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan provinsi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan serta memperkuat sistem informasi kesehatan dan pendidikan.
2. Terdapat beberapa usulan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Semarang yaitu, meningkatkan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, menyempurnakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial), melakukan pemerataan bantuan sosial kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan arus investasi PMA/PMDN untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, serta penguatan peran UMKM dan desa wisata sebagai penggerak pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Jakarta.
- . (2023). *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2023*. Kabupaten Semarang.
- . (2023). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023*. Provinsi Jawa Tengah.
- BPJS, 2020. *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)*, Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Elmeskov, Jergen & Karl Pichelmann (1993). *Interpreting Unemployment: The Role of Labour-Force Participation*. OECD Economic Studies (21).
- Irاندoust, M., 2023. Active labor market as an instrument to reduce unemployment. *Journal of Government and Economics*, Volume 9, pp. 1-10.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Ramirez, Alejandro, G. Ranis & F, Stewart. (1998). *Economic Growth and Human Capital*. QEH Working Paper No. 18.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi 9*. Penerbit Erlangga.
- UNDP. (1995). *“Human Development Report” United Nations Development Programme*. New York.

Wen, Y., Song, P., Gao, C. & Yang, D., 2023. Economic openness, innovation and economic growth: Nonlinear relationships based on policy support. *Heliyon*, Volume 9, pp. 1-11.